



PENERAPAN DIGITAL GOVERNMENT di ASEAN



MARGARETH INOF RIISYIE RANTUNG, SH, MH, MAP

PENERAPAN DIGITAL GOVERNMENT DI ASEAN

Margareth Inof Riisyie Rantung, SH., MH., MAP



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENERAPAN DIGITAL GOVERNMENT DI ASEAN

Penulis:

Margareth Inof Riisyie Rantung, SH., MH., MAP

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

v,83,Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-535-0

Cetakan Pertama:

September 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul "Penerapan Digital Government di ASEAN" ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai respon terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan penerapannya dalam pemerintahan, khususnya di kawasan ASEAN. Teknologi digital telah menjadi pilar penting dalam mendorong transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik di negara-negara ASEAN melalui konsep digital government.

Buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada pembaca mengenai konsep, manfaat, serta implementasi digital government di ASEAN. Selain itu, buku ini juga membahas berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN dalam mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga buku ini dapat disusun dan diterbitkan. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya para akademisi, peneliti, mahasiswa, dan praktisi yang tertarik pada bidang teknologi pemerintahan dan transformasi digital.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas pemerintahan di kawasan ASEAN melalui penerapan digital government.

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP E-GOVERNMENT	1
A. Definisi E-Government.....	2
B. Manfaat E-Government,	5
C. Jenis-jenis E-Government,.....	5
D. Manfaat E-Governmnet	6
E. Hubungan E-Government dengan Demokrasi	8
F. E- Government untuk Efisiensi	9
BAB 2. E- GOVERNMENT UNTUK PELAYANAN PUBLIK	11
A. E-Government Sebagai Pelayanan Publik	11
BAB 3 PEMERINTAHAN ERA DIGITAL	21
A. Paradigma Teknologi Pemerintahan.....	21
B. Teori Pemerintahan Digital.....	42
C. Model Governansi Digital Gil-Garcia.....	50
D. Konsep dan Kebijakan Publik Digital	51
BAB 4 Pemerintahan Digital Dalam Transformasi Digital ASEAN.....	54
A. Kemajuan ASEAN dalam Mengembangkan Pemerintahan Digital	56
B. Berbagai studi layanan public online di ASEAN	67
REFERENCES	76

BAB 1

KONSEP E-GOVERNMENT

Saat ini perkembangan teknologi Internet sudah mencapai perkembangan yang sangat pesat. Aplikasi Internet sudah digunakan untuk e-commerce dan berkembang kepada pemakaian aplikasi Internet pada lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan e-government. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlomba-lomba membuat aplikasi e-government. Pengembangan aplikasi e-government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat. Survei di beberapa negara menunjukkan bahwa ada kecenderungan aparat pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan secara online, karena mereka lebih menyukai metode pelayanan tradisional yang berupa tatap langsung, surat-menyurat atau telepon. Kita harus belajar dari penyebab-penyebab kegagalan e-government di sejumlah negara yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: ketidaksiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi, serta kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung.

E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan e-government ini. E-government dapatlah digolongkan dalam empat tingkatan. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melalui e-mail. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama.

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis.

A. DEFINISI E-GOVERNMENT

Apakah E-Government itu? Terlalu banyak definisi yang diberikan oleh para pakar seputar konsep ini. Namun, tulisan ini akan membeberkan beberapa di antaranya yang sesungguhnya satu sama lain memiliki beberapa persamaan.

Shailendra C. Jain Palvia and Sushil S. Sharma mendefinisikan E-Government sebagai:

... a generic term for web-based services from agencies of local, state and federal governments. In e-government, the government uses information technology and particularly the Internet to support government operations, engage citizens, and provide government services. The interaction may be in the form of obtaining information, filings, or making payments and a host of other activities via the World Wide Web.

Zhiyuan Fang, pada sisi lain, mendefinisikan E-Government sebagai:

... as a way for governments to use the most innovative information and communication technologies, particularly web-based Internet applications, to provide citizens and businesses with more convenient access to government information and services, to improve the quality of the services and to provide greater opportunities to participate in democratic institutions and processes.²

Eduardo Contreras Budge, juga mendefinisikan E-Government sebagai:

... is the systemic use of information and communication technologies (ICTs) to support the functions that a government performs for its constituents, typically the provision of information and services.

Tiga definisi di atas mengaitkan konsep-konsep pemerintahan dengan penggunaan teknologi informasi, khususnya yang berbasis world wide web (www), guna meningkatkan layanan pemerintah kepada public. Layanan ini dapat berupa penyediaan informasi dan merumuskan “what public wants.”

Layanan-layanan yang biasa diberikan lewat mekanisme E-Government cukup bervariasi. Palvia dan Sharma membaginya menjadi 4 lini, yaitu: Government to Citizen, Government to Business, Government to Government, dan Government to Constituents.

Government to Citizen. Aktivitas ini menandai penyediaan pemerintah akan akses online atas informasi serta layanan kepada warganegara. Ini memungkinkan warganegara mengajukan pertanyaan terhadap agen-agen pemerintah dan jawabannya; mengetahui pajak pendapatan (daerah, pusat, dan pemerintahan local); membayar pajak; memperbarui surat izin mengemudi; membayar tilang; ataupun mengubah alamat tempat tinggal (mengurus KTP).

Government to Business. Pemerintah di sini melakukan ‘two ways interaction’ dan transaksi lewat internet baik antara government to business maupun business to government. Sistem tender terbuka melalui mekanisme E-Government bertajuk Government to Business ini. Sebagai contoh, pemerintah HongKong menyediakan informasi-informasi seperti Electronic Tendering System (ETS) dan HK Post e-Cert, yaitu penerbitan sertifikat digital kepada individu dan organisasi.

Government to Government. Mengetengahkan aktivitas antar departemen atau organisasi pemerintahan. Aktivitas ini dimaksudkan demi mencapai efektivitas dan efisiensi kerja seluruh operasi pemerintahan. Di Amerika Serikat, sebagai missal, terdapat Intelink, yaitu teknologi intranet yang menyediakan informasi-informasi yang telah terklasifikasi dan disebarkan kepada seluruh agen intelijen.

Government to Constituent. Dikenal pula sebagai E-Democracy. Ia mengacu pada aktivitas online pemerintah, wakil rakyat, partai politik, dan warganegara dalam masalah proses-proses demokrasi. Ini termasuk diskusi dan konsultasi online antara wakil rakyat dengan konstituennya. Di situ www.dpr.go.id (milik DPR-RI) telah disediakan perangkat chatting dan nomor kontak wakil rakyat. Tujuannya, konstituen dapat mendiskusikan dan mencari solusi atas masalah-masalah kebijakan yang ditemui. Atau, menagih janji kampanye, tentunya. Di Korea Selatan, para politisi menggunakan internet guna menjaring pemilih.

Pertanyaan kemudian adalah, seberapa signifikan peran dari E-Government dalam tata kehidupan demokrasi? Organization for Economic

Co-Operation and Development (OECD) menandai 6 signifikansi dari E-Government yaitu: (1) E-Government meningkatkan Efisiensi; (2) E-Government meningkatkan Pelayanan; (3) E-Government membantu pencapaian hasil kebijakan; (4) E-Government berkontribusi atas sasaran kebijakan ekonomi; (5) E-Government berkontribusi atas Reformasi; (6) E-Government mendorong Trust antara Pemerintah dan Warganegara.

Selain itu, Eduardo Contreras Budge menandakan E-Government mampu berkontribusi pada hal-hal seperti peningkatan efisiensi operasi pemerintah, peningkatan transparansi, dan memodernisasi sector public. 6 Efisiensi operasi pemerintah diperoleh berkat otomatisasi/digitasi fungsi-fungsi administrasi, yang dengan lain kata menyederhanakan proses dan penyampaian layanan.

Peningkatan transparansi, juga akuntabilitas, diperoleh memungkinkan sector public memperluas peran mereka berdasar tesis penyedia layanan yang client-oriented. Juga, E-Government memungkinkan operasi pemerintah berikut hasilnya terbuka bagi public. Selain itu, E-Government juga memungkinkan terjadinya modernisasi atas sector public. Satu tesis dasar modernisasi adalah pencapaian efisiensi kerja dengan biaya yang kecil. Lewat E-Government, pemerintah mampu menghemat dana penyebaran informasi konvensional dengan penyebarannya lewat internet, terlebih ke daerah-daerah yang mahal sarana transportasi.

Ada tiga model penyampaian E-Government, antara lain :

1. Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C)
Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, Contohnya G2C : Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi, Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana.
2. Government-to-Business (G2B)
Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih

efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement. Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll

3. Government-to-Government (G2G)

Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi. Contoh : Konsultasi secara online, blogging untuk kalangan legislative, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.

B. MANFAAT E-GOVERNMENT,

- Yang pertama untuk memperbaiki kualitas layanan dari pemerintah kepada para stakeholder, terutama yaitu dalam hal-hal kinerja efektifitas serta efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara.
- Yang kedua untuk meningkatkan transparansi kontrol serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
- Dan yang ketiga untuk mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan juga interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan aktivitas sehari-hari.

C. JENIS-JENIS E-GOVERNMENT,

- *Government to Citizen (G2C)* adalah suatu teknologi informasi yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan juga untuk mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan. Misal contoh seperti : <http://www.jabarprov.go.id>, dan lain-lain. Atau informasi mengenai pajak online, layanan jaminan sosial, mencari lowongan pekerjaan, dan sebagainya.
- *Government to Business (G2B)* adalah suatu tipe hubungan pemerintah dengan bisnis. Karena sangat dibutuhkan relasi yang sangat baik, antara pemerintah dengan kalangan bisnis. Tujuannya

demikian kemudahan berbisnis masyarakat kalangan pembisnis. Contohnya seperti : <http://www.indotender.com>, dan sebagainya. Atau informasi mengenai pajak perseroan, peraturan pemerintah (hukum bisnis), pendaftaran perusahaan, peluang usaha atau bisnis, dan sebagainya.

- *Government to Government (G2G)* adalah berupa Web pemerintah yang dibuat, bertujuan untuk memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antara pemerintahan yang satu dengan pemerintahan yang lainnya, dengan tujuan yaitu untuk memperlancar & mempermudah kerjasama antara pemerintahan – pemerintahan yang bersangkutan. Misal contohnya: <http://www.embassyofindonesia.org> dan lain sebagainya. Atau informasi mengenai blogging untuk kalangan legislative, konsultasi secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu, pendidikan secara online, dan sebagainya.
- *Government to Employees (G2E)* adalah berupa tipe hubungan yang ditujukan untuk para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri untuk meningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja disalah satu institusi pemerintah. Misalkan contohnya: <http://www.sdm.depkeu.go.id> dan lain-lain.

D. MANFAAT E-GOVERNMENT

Keuntungan E-Government bagi rakyat

1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan [transparansi] maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan

sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.

4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.
6. e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri.
7. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Selain tampilan dan paduan warna yang menarik, informasi-informasi yang disajikan sangatlah lengkap dan up to date.
8. Terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta informasi tentang tinggi muka air.
9. Website ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan, dan sebagainya.
10. Semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat.

Kerugian E. Government

1. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.
2. Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat, karena e- government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan.
3. Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik.
4. Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan

peraturan, prosedur dan keterbatasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem pemerintahan

5. Belum mapannya strategi serta tidak memaainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government
6. Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian
7. Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet

E. HUBUNGAN E-GOVERNMENT DENGAN DEMOKRASI

Pengertian e-government dan hubungan dengan demokrasi dapat dicari pada karakteristik-karakteristik yang dimiliki demokrasi. Dalam demokrasi masalah-masalah seperti keluasan cakupan, transparansi, control terhadap agenda yang dilaksanakan para wakil rakyat semakin menjadi kebutuhan. Masalah-masalah ini semakin menemukan jalan keluar seiring perkembangan teknologi, khususnya di bidang informasi. Internet, sebagai inovasi teknologi informasi, membuat berkembang sebuah jenis mekanisme pemerintahan yang disebut E-Government (Electronic Government).

Dalam pengertian demokrasi secara substansial, hal-hal seperti keterbukaan dan pelibatan warganegara kemungkinan mulai dapat terselenggara lewat E-Government ini. Publik dapat mengetahui berapa jumlah partai yang ikut serta pemilu, siapa nama-nama caleg, perkembangan koalisi pemerintahan, kasus-kasus yang menimpa wakil rakyat, pesan-pesan warganegara terhadap anggota legislative, diyakini dapat terselenggara lewat mekanisme E-Government ini secara langsung.

Demokrasi erat berkait dengan kemampuan warganegara dalam mempengaruhi fungsi input sistem politik. Komunikasi politik, sosialisasi politik, artikulasi kepentingan, rekrutment politik, dan agregasi kepentingan, merupakan beberapa fungsi input sistem politik yang penting. Fungsi-fungsi input tersebut memiliki kemungkinan tersebar aksesnya secara lebih luas lewat E-Government ini. Ini guna mengatasi terbatasnya penyelenggaraan fungsi-fungsi input konvensional. Agen-agen yang melangsungkan fungsi

input (partai politik, LSM, pemerintah, pers) dapat memanfaatkan E-Government untuk tujuan-tujuannya sendiri.

Kaitan antara E-Government dan Demokrasi terletak pada tujuan dari demokrasi dan bagaimana kemungkinan pencapaian atas itu terselenggara lewat mekanisme E-Government. Kesulitan dari Demokrasi Perwakilan (representative democracy) ini adalah desentralisasi peran politik warganegara kepada wakil rakyat (legislatur). Akibat sejumlah factor, penyampaian kepentingan dari warganegara tidak terselenggara secara maksimal. Untuk itu diperlukan terobosan baru bagaimana warganegara dapat menentukan kinerja fungsi input pemerintahan. E-Government membuka kesempatan tersebut.

Steven N. Clift menunjukkan sejumlah tujuan yang inheren di dalam demokrasi dan kaitannya dengan E-Government.⁷ Ketujuh tujuan tersebut adalah : (1) Kepercayaan dan Akuntabilitas; (2) Legitimasi dan Pemahaman; (3) Layanan dan Kepuasan WargaNegara; (4) Jangkauan Akses; (5) Perwakilan Efektif dan Pembuatan Keputusan; (6) Partisipas lewat Fungsi Input dan Konsultasi; dan (7) Keterlibatan dan Kesengajaan.

F. E- GOVERNMENT UNTUK EFISIENSI

Pemerintahan dengan sistem elektronik atau lebih dikenal dengan istilah E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi akutabilitas penyelenggaraan negara.

Berdasarkan Intruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government diarahkan untuk mencapai empat tujuan. Pertama adalah membangun jaringan informasi guna mendukung pelayanan publik dengan kualitas memuaskan dapat diakses masyarakat luas, serta dengan biaya yang terjangkau. Kedua, mendorong kerjasama antar lembaga pemerintah dan swasta secara interaktif untuk meningkatkan perekonomian nasional. Ketiga, membentuk mekanisme dan saluran komunikasi antar lembaga pemerintah dengan publik dan tujuan keempat yaitu membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang lancar, transparan dan efisien.

E-Government di Indonesia mulai sejak tahun 2001 yaitu sejak munculnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tgl. 24 April 2001 tentang

Telematika Telekomunikasi, Media dan Informatika yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Namun dalam perjalanannya inisiatif pemerintah pusat ini tidak mendapat dukungan serta respon dari segenap pemangku kepentingan pemerintah yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal.

BAB 2

E- GOVERNMENT UNTUK PELAYANAN PUBLIK

A. E-GOVERNMENT SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK

e-government adalah pelayanan publik yang dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah yang terkoordinasi satu dengan lainnya secara optimal dengan menggunakan teknologi telematika. E-Government harus dipandang sebagai sarana bukan sebagai tujuan. Agar implementasi e-government dapat terlaksana dengan baik perlu diperhatikan faktor teknis dan non-teknis yang dapat mempengaruhi keberhasilan. Implementasi e-government yang dikaitkan dengan upaya memenuhi kebutuhan semua sektor kegiatan baik dipemerintahan dan masyarakat membutuhkan patron dari pemimpin yang dapat memberikan teladan dan komitmen bersama. Kepemimpinan menjadi kunci keberhasilan implementasi e-government sebagaimana telah ditunjukkan Singapura, Amerika Serikat, Korea, dan banyak negara yang telah mampu melaksanakan e-government.

Bila visi, definisi, dan leadership sudah dimiliki, faktor yang menentukan dalam suksesnya implementasi e-government adalah kesepakatan mengenai sasaran yang ingin dicapai dengan e-government ini. Secara bijak Amartya Sen, ekonom pemenang hadiah nobel ekonomi, mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat (means), bukan tujuan (ends). Kesalahan dalam menetapkan tujuan membawa kita terjebak pada keberhasilan semu. Kejelasan sasaran dan pemahaman serta konsistensi semua pelaku terhadap tercapainya sasaran inilah yang perlu disepakati sejak awal suatu pemerintah merencanakan membangun e-government. Kalau tidak, yang akan terbentuk adalah aplikasi aplikasi telematika yang dibangun tanpa mengindahkan harmonisasi dan sinergi dengan elemen-elemen pemerintah dan masyarakat.

REFERENCES

- ASEAN (2000), *e-ASEAN Framework Agreement*. Jakarta: ASEAN Secretariat. <https://agreement.asean.org/media/download/20140119121135.pdf>
- (2015), *The ASEAN ICT Masterplan 2020*. Jakarta: ASEAN Secretariat. https://asean.org/wp-content/uploads/images/2015/November/ICT/15b%20--%20AIM%202020_Publication_Final.pdf
- (2016), *Master Plan on ASEAN Connectivity 2025*. Jakarta: ASEAN Secretariat. <https://asean.org/wp-content/uploads/2018/01/47.-December-2017-MPAC2025-2nd-Reprint-.pdf>
- (2021a), *ASEAN Digital Integration Index: Measuring Digital Integration to Inform Economic Policies*. Jakarta: ASEAN Secretariat. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ADII-Report-2021.pdf>
- (2021b), *ASEAN Digital Masterplan 2025*. Jakarta: ASEAN Secretariat. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Digital-Masterplan-EDITED.pdf>
- (2021c), ‘Joint Media Statement of the First ASEAN Telecommunications and IT Ministers (TELMIN)’, Kuala Lumpur, 13–14 July.
- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative public management: New strategies for local governments*. Georgetown University Press.
- Altman, M., & McDonald, M. P. (2014). HOW INDEPENDENT COMMISSIONS COULD USE THE INTERNET AND OPEN SOFTWARE TO MAXIMIZE TRANSPARENCY AND PUBLIC ENGAGEMENT IN REDISTRICTING. www.scholarsstrategynetwork.org
- Arden, J. (2018). Engaging with an uncertain world. *New Zealand International Review*, 43(3), 5–7. <https://www.jstor.org/stable/48552094>
- Ball-Rokeach, S. J., & DeFleur, M. L. (1976). A dependency model of mass-media effects. *Communication Research*, 3(1), 3–21.

- Bank, W. (2017). World development report 2017: Governance and the law. The World Bank.
- Baudrillard, J. (1994). Simulacra and simulation. University of Michigan press.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. WW Norton & Company.
- Business Review, H. (2022). Insights You Need from Harvard Business Review. In Coronavirus and Business: The Insights You Need from Harvard Business Review.
- Caragliu, A., Del Bo, C. F., & Nijkamp, P. (2023). “Smart Cities in Europe” Revisited: A Meta-Analysis of Smart City Economic Impacts. *Journal of Urban Technology*, 1–19.
- Carr, N. (2020). The shallows: What the Internet is doing to our brains. WW Norton & Company.
- Castells, M. (2009). The Rise of the network society Volume 1 With a new preface. Book The Rise of the Network Society, Volume 1, With a New Preface.
- Cebula, J. L., & Young, L. R. (2010). A taxonomy of operational cyber security risks. Carnegie-Mellon Univ Pittsburgh Pa Software Engineering Inst.
- Chen, L. and L. Ruddy (2020), ‘Improving Digital Connectivity: Policy Priority for ASEAN Digital Transformation’, *ERLAPolicyBrief*. No. 2020-07. Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).
- Chiappone, L. L. (2014). Collective Intelligence: Mankind’s Emerging World in Cyberspace. Pierre Levy (translated from the French by Robert Bononno). New York: Plenum Trade, 1997. pp. xxviii, 277. In Educational Studies (pp. 44–47). Routledge.
- COSO. (2017). Enterprise Risk Management. Integrating with strategy and performance. In Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: Vol. II (Issue June).
- De Haes, S., Van Grembergen, W., De Haes, S., & Van Grembergen, W. (2015). Enterprise governance of IT. Springer.

- Denham, E. (2013). Evaluating the Government of British Columbia's Open Government Initiative. Office of the Information and Privacy Commissioner for British Columbia.
- Dictionary, O. E. (1989). Oxford english dictionary. Simpson, Ja & Weiner, Esc, 3.
- Dunleavy, P., & Margetts, H. (2015). Design principles for essentially digital governance.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Tinkler, J., & Bastow, S. (2006). Digital era governance: IT corporations, the state, and e-government. Oxford University Press.
- Etzioni, A. (2011). Cybersecurity in the private sector. *Issues in Science and Technology*, 28(1), 58–62.
- Ferdinand, J., & Benham, R. (2017). The cyber security ecosystem: defining a taxonomy of existing, emerging and future cyber threats.
- Floridi, L., & Sanders, J. W. (2004). On the morality of artificial agents. *Minds and Machines*, 14, 349–379.
- Fountain, J. E. (2004). Building the virtual state: Information technology and institutional change. Brookings institution press.
- Gil-Garcia, J. R. (2012). Towards a smart State? Inter-agency collaboration, information integration, and beyond. *Information Polity*, 17(3–4), 269–280.
- Gil-Garcia, J. R. (2013). E-Government Success Factors and Measures: Theories, Concepts, and Methodologies: Theories, Concepts, and Methodologies. IGI Global.
- Gil-Garcia, J. R., & Martinez-Moyano, I. J. (2007). Understanding the evolution of e-government: The influence of systems of rules on public sector dynamics. *Government Information Quarterly*, 24(2), 266–290.
- Gil-Garcia, J. R., & Miranda, F. G. (2010). E-government and opportunities for participation: The case of the Mexican state web portals. In *Politics, Democracy and E-Government: Participation and Service Delivery* (pp. 56–74). igi Global.

Gorry, G. A., & Scott Morton, M. S. (1971). A framework for management information systems.

Government of Singapore (2020), Digital Government Blueprint. <https://www.tech.gov.sg/digital-government-blueprint/>
Government Technology Agency (GovTech) (n.d.), Digital Government Transformation. <https://www.tech.gov.sg/digital-government-transformation/>

Heeks, R. (2001). Reinventing government in the information age: International practice in IT-enabled public sector reform (Vol. 1). Psychology Press.

Heller, H. (2011). MARXIST PERSPECTIVES. In *The Birth of Capitalism* (pp. 176–214). Pluto Press.
<https://doi.org/10.2307/j.ctt183p671.10>

Hollands, R. G. (2020). Will the real smart city please stand up?: Intelligent, progressive or entrepreneurial? In *The Routledge companion to smart cities* (pp. 179–199). Routledge.

Indrajit, Ricardus Eko. 2006. *Electronic Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Aptikom.

Indrajit, Ricardus Eko. 2013. Introspeksi Penerapan e-Government, dalam Seri 999 e-artikel Sistem dan Teknologi Informasi Nomor 253.

Irawan, Bambang. 2013. Studi Analisis Konsep e-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik, dalam *Jurnal Paradigma* Vol 2 No. 1.

International Finance Corporation. (2014). *The Indonesia Corporate Governance Manual - First Edition*. Otoritas Jasa Keuangan, 1(7).

Kemenperin. (2018). *Making Indonesia 4.0*.

Kurzweil, R. (2014). *The singularity is near*. Springer.

Lembaga Administrasi Negara. 2014. *Handbook inovasi administrasi negara*, Cetakan I, Jakarta, Indonesia: Pusat INTAN-DIAN-LAN. *Membangun Pertumbuhan Ekonomi Lewat Mal Pelayanan Publik*.

Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Pelayanan Publik Digital Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

- Latonero, M. (2018). Governing artificial intelligence: Upholding human rights & dignity.
- Latour, B. (2007). Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory. Oup Oxford.
- Lazer, D., & Radford, J. (2017). Annual Review of Sociology Data ex Machina: Introduction to Big Data. *The Annual Review of Sociology* Is Online At, 43, 19–39. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-060116>
- Lévy, P. (1997). Collective intelligence: Mankind's emerging world in cyberspace. Perseus books.
- Malatji, M. (2023). Management of enterprise cyber security: A review of ISO/IEC 27001: 2022. 2023 International Conference On Cyber Management And Engineering (CyMaEn), 117–122.
- Manovich, L. (2002). The language of new media. University of Toronto Press.
- Mayer-Schönberger, V. (2010). Beyond Privacy, Beyond Rights—Toward a "Systems" Theory of Information Governance. *California Law Review*, 1853–1885.
- Mayer-Schönberger, V., & Lazer, D. (2007). Governance and information technology: From electronic government to information government. Mit Press.
- McCarthy, C., & Harnett, K. (2014). National institute of standards and technology (nist) cybersecurity risk management framework applied to modern vehicles. United States. National Highway Traffic Safety Administration.
- McLuhan, M. (1994). Understanding media: The extensions of man. MIT press.
- Negroponte, N. (1996). (1995). Being Digital. Knopf.
- Negroponte, N., Harrington, R., McKay, S. R., & Christian, W. (1997). Being Digital. *Computer in Physics*, 11(3), 261–262. <https://doi.org/10.1063/1.4822554>
- Nissenbaum, H. (2009). Privacy in context. In *Privacy in Context*. Stanford University Press.
- Noble, D. (2017). Forces of production: A social history of industrial automation. Routledge.

- Noveck, B. S. (2015). *Smart citizens, smarter state: The technologies of expertise and the future of governing*. Harvard University Press.
- OECD. (2010). *Denmark, Efficient E-government for Smarter Public Service Delivery*. OECD E-Government Studies,.
- OECD. (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2015*. In *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2015*. <https://doi.org/10.1787/9789264236882-en>
- OECD. (2020). *Digital Government Index: 2019 results*.
- Osborne, D. (1993). *Reinventing government*. *Public Productivity & Management Review*, 349–356.
- Oxford University Press. (2015). *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (10th ed.). Oxford University Press.
- OECD(2020), 'DigitalGovernmentIndex:2019Results', *OECDPublicGovernancePolicyPapers*, No.03.
- Paris:OrganisationforEconomicCo-operationandDevelopment.
- Singaporean National Computer Board (1992), *A vision of an intelligent island: IT2000 Report*. Singapore: NationalComputerBoard.
- Smart Nation and Digital Government Office (2018), 'Smart Nation: The Way Forward'. <https://www.smartnation.gov.sg/files/publications/smart-nation-strategy-nov2018.pdf>
- Polii, E. H., Pangkey, I., & Dilapanga, A. R. (2021). Evaluation of Governance Implementation Minahasa Regency Drinking Water Company. *International Journal of Social Science and Human Research*, 04(06). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i6-25>
- Rogers, D. L. (2016). *The digital transformation playbook: Rethink your business for the digital age*. Columbia University Press.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations*. NY. NY. Free Press, A division of Simon and Schuster, Inc.
- Sandoval-Almazán, R., Luna-Reyes, L. F., Luna-Reyes, D. E., Gil-Garcia, J. R., Puron-Cid, G., & Picazo-Vela, S. (2017). *Building digital government strategies*. *Public Administration and Information Technology*, 16.
- Schneider, S. (2019). *The Impacts of Digital Technologies on Innovating for Sustainability*. In *Palgrave Studies in Sustainable Business in*

- Association with Future Earth (pp. 415–433). Springer Nature.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-97385-2_22
- Schneier, B. (2015). *Secrets and lies: digital security in a networked world*. John Wiley & Sons.
- Schwab, K. (2017). *The fourth industrial revolution*. Currency.
- Solove, D. J. (2008). *Understanding privacy*.
- Tapscott, D. (1999). *The Digital Economy Anniversary Edition: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. *Innovation Journal*, 19(5).
- Trist, E., & Emery, F. (2005). *Socio-technical systems theory. Organizational Behavior 2: Essential Theories of Process and Structure*, 169.
- Turkle, S. (2006). *Always-on/always-on-you: The tethered self*. *Handbook of Mobile Communication Studies*.
- UNDP. (1997). *The Concept & Theories of Governance*. United Nations Development Programme, 106(32).
- United Nations. (2018). *Gearing E-Government to Support Transformation towards Sustainable and Resilient Societies*. In *United Nations e-Government Survey 2018*.
- United Nations. (2022). *E-Government Survey 2022*.
<https://publicadministration.un.org/en/>
- United Nations (2020), *E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- Weill, P., & Ross, J. W. (2004). *IT governance: How top performers manage IT decision rights for superior results*. Harvard Business Press.
- West, D. M. (2005). *Digital government: Technology and public sector performance*. Princeton University Press.
- Westin, A. F. (1968). *Privacy and freedom*. *Washington and Lee Law Review*, 25(1), 166.
- Westin, A. F. (2003). *Social and political dimensions of privacy*. *Journal of Social Issues*, 59(2), 431–453.
- World Bank. (1994). *Governance: The World Bank's experience*. In *World Bank*.

World Bank. (2016). World development report 2016: Digital dividends.
World Bank Publications.

United Nations (2020), *E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development*. New York: United Nations

.



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-535-0 (PDF)



9 786231 475350